

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif</b>	<b>80 %</b>
2		<b>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina</b>	<b>148 Lembaga</b>
3		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	92 Orang
4		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
5		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga
6		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	5 Sertifikat
7		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS yang Tertangani</b>	<b>90 %</b>
8		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	<b>750 Orang</b>
9		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang
10		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75 Orang
11		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang
12		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
13		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang
14		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti</b>	<b>Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti</b>	<b>2710 Orang</b>
15		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemuenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
16		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
17		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
18		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
19		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen

NO	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
20		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>87,97 %</b>
21		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</b>	<b>17 Layanan</b>
22		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang
23		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga
24		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang
25		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang tertangani</b>	<b>100 %</b>
26		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana</b>	<b>100 %</b>
27		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang
28		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang
29		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang
30		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah anggota TAGANA yang dibina</b>	<b>30 Orang</b>
31		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang
32			Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	0 Unit
33		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase TMP yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>
34		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah makam yang dipelihara</b>	<b>98 Makam</b>
35		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam
38	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase organisasi perempuan yang aktif</b>	<b>100 Persen</b>
			<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b>	<b>20 Persen</b>
39		<b>Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah OPD yang memiliki data terpilih</b>	<b>23 OPD</b>
			<b>Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS</b>	<b>23 OPD</b>
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah
		<b>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>50 %</b>
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus</b>	<b>100 persen</b>

NO	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	12 Lembaga
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>100 BTJ</b>
		<b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan</b>	<b>8 Lembaga</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen
		<b>Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Persentase kasus yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	12 layanan
		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah</b>	<b>Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>10 Layanan</b>
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen
	Meningkatkan pemenuhan hak anak	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>83 %</b>
		<b>Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA</b>	<b>35 Lembaga</b>
		Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi
		<b>penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Persentase forum anak aktif</b>	<b>70%</b>
			<b>Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA</b>	<b>100 Persen</b>
			<b>Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA</b>	<b>100 Persen</b>
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35 Orang
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	<b>100 BTJ</b>
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase kasus yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen

NO	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
		<b>Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota</b>	<b>Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani</b>	<b>100 %</b>
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas</b>	<b>8 Lembaga</b>
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan</b>	<b>100 %</b>
		<b>Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan</b>	<b>1 Dokumen</b>
		Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	25 Kegiatan
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisasi
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	20 Satuan Pendidikan
		<b>Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabuapten/kota</b>	<b>Jumlah rumah dataku yang dikembangkan</b>	<b>16 Unit</b>
		pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	16 Unit
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase CPR</b>	<b>65 %</b>
		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif</b>	<b>2450 Orang</b>
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi
		<b>Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)</b>	<b>Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina</b>	<b>99 Orang</b>
		Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi

NO	Sasaran Strategi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
		<b>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.</b>	<b>Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB</b>	<b>50 %</b>
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi
	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stuntin	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga</b>	<b>65 %</b>
		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina</b>	<b>114 Kelompok</b>
		Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan
		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	223 Kader
		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan
		Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Unit
		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB</b>	<b>100 %</b>
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja	1 Laporan

Padang, 15 Februari 2025  
Kepala Dinas Sosial, PPPA



Drs. OSMAN S. H. NUR, M.Si  
NIP 196901201989021001